

JURNAL
KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN
PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO.2198/PDT.G/2012/PA.MLG)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SARY HARIYANTI

NIM. 105010107111022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERMOHONAN PERKAWINAN
POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 2198/PDT.G/2012/PA.MLG)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : Sary Hariyanti**
- b. NIM : 105010107111022**
- c. Konsentrasi : Perdata Murni**

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

M. Hisyam Syafioedin, S.H.

NIP. 195004221979031002

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

NIP. 198004192008121002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.

NIP. 196606221990022001

ABSTRAK

SARY HARIYANTI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2014, *“Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg)”* M. Hisyam Syafioedin,SH; M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn.

Skripsi ini Penulis membahas salah satu isu hukum yaitu putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang penetapan harta bersama dalam permohonan poligami yang dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan Anwar dan mengizinkan Anwar menikah lagi dengan Sukiyem serta menetapkan harta bersama Anwar dan Sakinah. Tujuan dari penelitian ini untuk Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg tentang harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami dan Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg pembagiannya tergantung pada keadaan harta bersama tersebut, apabila harta bersama bergabung tidak dipisahkan antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perincian sesuai pedoman yang dimuat buku II dan dengan memperhatikan aspek kearifan, dan keadilan. Apabila harta bersama telah dipisah sejak semula antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki dipisahkan dan berdiri sendiri.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Harta Bersama.

ABSTRACT

Sary Hariyanti, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, September 2014, "Application for the Position Treasure Together In Marriage Polygamy (Study Case Decision No. 2198 / PDT.G / 2012 / PA.Mlg" Hisham M. Syafioedin, SH; M. Masykur Hamidi , SH., M.Kn.

This thesis author discusses one of the legal issues that verdict case number 2198/ Pdt.G/2012/PA.Mlg on the determination of common property in a polygamous application in Anwar verdict and the judge granted a permit to remarry Sukiyem Anwar and Anwar establish joint property and sakinah. The purpose of this study was to determine the basis and consideration to the judge in the case set number 2198/ PDT.G/2012/ PA.Mlg of joint property in the polygamous marriage application and to determine the position of the joint property in polygamous marriages especially petition case number 2198/PDT.G/2012 / PA.Mlg. This study uses normative research and research approaches used in this study is the approach used in this research is the approach legislation (statute approach). Based on the research conducted, the researchers obtained the result that the consideration of the judges in the case of polygamy, permit the Applicant (husband) as well as establishing joint property is located on the Applicant and the Respondent, in accordance with the provisions of Article 94 paragraph (1) Compilation of Islamic Law is a treasure of marriage with a husband who has more than one wife, each separate and independent and judges have also implement the above statutory objectives with the priorities put forward the rule of law, then justice and expediency. And the position of the joint property in the polygamous marriage case number 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg distribution depends on the state of the joint property, joint property if the join is not separated between community property acquired during married with a wife first, second, third and fourth, the distribution can be used ketentuap Article 65 of Law No. 1 of 1974 in accordance with the details of the second book published guidelines and with the aspect of wisdom, and justice. If the joint property has been divided from the beginning between the joint property acquired during married with a wife first, second, third and fourth, then the division can use the provisions of Article 94 of the Compilation of Islamic Law that requires separate and independent.

Keywords: Marriage, Polygamy, Joint Treasure.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib. Dalam tatanan kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila sehingga tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat.¹

Perkawinan dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di dalam Peraturan ini mengartikan perkawinan adalah sebagai ikatan lahir dan bathin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (berumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena merupakan ikatan lahir bathin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka bagi Bangsa Indonesia suatu perkawinan itu dinilai bukan untuk memuaskan nafsu biologis akan tetapi merupakan sesuatu yang sakral.² Tujuan perkawinan hanya dimungkinkan dicapai jika antara suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya, sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga.³ Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami isteri.

¹ Budi Winarno, **Sistem Politik Indonesia Era Reformasi**, Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008, hal. 6

² Lili Rasjidi, **Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Alumni, Bandung, 1983, Hal. 4

³ H.M., Anshary MK, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.130.

Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut.⁴

Suami maupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana maksud pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵

Dalam putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg ada perbedaan dengan ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Perbedaan Putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg dengan ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada asas Hukum Acara Perdata bahwa hakim memutuskan harta bersama yang tertera pada putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg telah menetapkan harta bersama antara pihak suami dengan pihak isteri pertama dalam hal tidak ada pemisahan harta ataupun pembagian harta karena tidak adanya perceraian dalam perkawinan poligami, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dimana pasal ini menyebutkan bahwa harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, maka harta bersama tersebut harus terpisah dan berdiri sendiri.
2. Yang kedua yaitu perbedaan putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 yaitu hakim juga memutuskan bahwa pada penetapan harta bersama, hakim memutuskan tidak berdasarkan hukum adat, hukum agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Letak dari ketidaksesuaian hukum adat yaitu hakim memutuskan tidak berdasarkan variasi hukum adat, sehingga hal ini terdapat pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta bersama.

Praktek selama ini pengaturan terkait penetapan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan terjadi ketika para pihak setelah adanya perceraian sebagaimana diatur dalam

⁴ *Ibid*, hal 131.

⁵ Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Di dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dan penetapan diatur pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu ayat (1) "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Dan ayat (2) "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat".⁶

Kasus kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami yang pernah dialami oleh Anwar (bukan nama sebenarnya), umur 52 tahun dan Sakinah (bukan nama sebenarnya), umur 52 tahun. Pasangan ini menikah pada tanggal 17 September 1979 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979. Pada bulan Januari tahun 2011 Anwar berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sukiyem (bukan nama sebenarnya) dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi. Dengan adanya hubungan tersebut Anwar telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Sakinah dan keluarganya dan pihak sakinah dan keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon isteri kedua Anwar juga sudah sering bertemu dengan Sakinah.

Sehubung dengan hal tersebut, Anwar mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan Sukiyem, umur 38 tahun. Anwar menyatakan sanggup dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dan anak-anaknya kelak setiap harinya dimana Anwar tersebut mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini pernyataan tersebut terlampir dalam surat permohonan izin poligami dan Sakinah dan Sukiyem masing-masing bersedia untuk dimadu oleh Anwar sebagaimana surat kesediaanya juga terlampirkan. Anwar dan Sakinah selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut: (a). 5 unit kendaraan angkot penumpang (Mikrolet); (b). Sebidang tanah yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; (c). Sebidang tanah berikut bangunan rumah di

⁶ Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam.

atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; (d). Dan semua perabot rumah tangga yang berada dirumah Anwar dan Sakinah.

Perkara tersebut diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam putusan nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.MLG. Dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan Anwar dan mengizinkan Anwar menikah lagi dengan Sukiyem serta menetapkan harta bersama Anwar dan Sakinah. Dengan melihat putusan hakim tersebut penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg).”*

II. RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg tentang harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami?
2. Bagaimana kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg?

III. PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg Tentang Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena Hakim merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.⁷

Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional”. Suatu putusan hakim harus adil,

⁷ Ayu Tunjung Wulandari, SKRIPSI, *Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Penetapan Isbat Nikah*, Malang, 2013, hal 52.

tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Maka dari itu hakim harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara 3 (tiga) unsur secara proposional dalam suatu putusan tidaklah mudah. Hal tersebut merupakan seni atau kiat sendiri.⁸

Dalam perkara permohonan penetapan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg, hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan permohonan dan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan. Adapun bukti surat yang diajukan adalah Surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tanggal 12 Nopember 2012 (P.1), Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 12 Nopember 2012 (P.2), Surat pernyataan tidak keberatan menjadi isteri ke-2, tanggal 12 Nopember 2012 (P.3), Surat keterangan penghasilan, Nomor: 474/2/69/35.73.03.1009/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kota Malang (P.4), Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Malang (P.5), Fotocopy Sertifikat No. 2788 atas nama Anwar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.6), Fotocopy Sertifikat No. 2787 atas nama Anwar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.7), Fotocopy Sertifikat No. 2932 atas nama Anwar, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peralihan Hak tanggal 13 Oktober 2009 (P.8), Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anwar, nomor 3573031707590003 dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Anwar nomor 3573035007600007 serta KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sukiyem nomor 3077400023573035 yang masing-masing dikeluarkan oleh Camat Kandang (P.15). Adapun bukti saksi yang diajukan yaitu adik pemohon dan tetangga pemohon.

Dan faktor-faktor pertimbangan hakim menetapkan harta bersama dalam izin poligami dalam perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Bahwa suami (pemohon) mengajukan permohonan poligami dengan alasan isteri (termohon) tidak bisa memberikan keturunan, hal ini diakui oleh termohon. Dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami sebagaimana maksud dari pasal 4

⁸ Sudikno Mertokusumo, **Teori Hukum**, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2011, hal. 23.

ayat 2 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 58 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

2. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri. Termohon telah memberi pernyataan persetujuan tidak keberatan dimadu sebagaimana bukti tertulis (P.1) tertanggal 12 Nopember 2012.
3. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap isteri dan anaknya. Pemohon telah membuat surat pernyataan berlaku adil (bukti P.2) tertanggal 12 Nopember 2012.
4. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjalani keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan menyatakan bahwa pemohon termasuk orang yang mampu dengan penghasilan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis (P.4), tertanggal 12 Nopember 2012.
5. Tidak adanya larangan menurut hakim terhadap perkawinan antara pemohon dan calon isteri dan tidak adanya pula halangan antara termohon dengan calon isteri sebagaimana ketentuan pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974.
6. Adanya permohonan penetapan harta bersama. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam buku II dan majelis hakim telah menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon sebagai berikut:
 - a. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Anwar dengan nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001.
 - b. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Anwar JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001.
 - c. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar. dengan nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL 4103J658366 tahun 2003
 - d. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009.

- e. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Anwar dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003.
- f. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Anwar dengan nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVR FED5K000985 tahun 2005.
- g. Sebuah bangunan Toko Elektronik “TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di jalan Mawar Kota Malang , dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati
 - Sebelah Utara : Jalan Mawar Kota Malang
 - Sebelah Timur : Gang V
- h. Sebuah bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 m² , bangunan rumah dan bangun Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No. 2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Yayasan Al-Azhar
 - Sebelah Utara : Yayasan Al-Azhar
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
 - Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair
- i. Dana tabungan Deposito Rp. 40.000.000,- di BTN Sawojajar (empat puluh juta rupiah) atas nama Anwar meskipun dalam positanya, pemohon hanya mengajukan penetapan harta bersama untuk ditetapkan, yaitu:
 - a) 5 (lima) unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
 - b) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang;
 - c) Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang;
 - d) Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon.

Menurut hasil wawancara penyusun dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Malang penyusun dengan salah satu hakim Pengadilan Agama bapak Munasik, bahwa dasar hukum yang digunakan pada putusan no. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg adalah pasal 94

Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemisahan harta dalam perkawinan poligami. Selain dasar hukum yang digunakan majelis hakim selain dari pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim juga menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Alasan majelis hakim, menetapkan harta bersama dalam perkara perijinan poligami ada tiga, yaitu:⁹

1. Untuk melindungi harta isteri agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga hartanya jelas dan tidak kabur. Mengingat tujuan lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindungi kaum perempuan.
2. Melaksanakan ketentuan KHI pasal 94 ayat 1 yang dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri-sendiri.
3. Majelis hakim menggunakan buku II dari Mahkamah Agung sebagai landasan beracara. Didalamnya juga mengatur tentang perijinan poligami harus disertai adanya penetapan harta bersama.

Putusan Majelis hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon. Hal ini menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Maksud dari 3 (tiga) tujuan tersebut yaitu:

- a. Asas kepastian hukum: sudah dijelaskan bahwa harta isteri pertama menjadi jelas dan pasti bagi semua pihak atau hak-haknya, sehingga harta isteri pertama tersebut sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Asas keadilan: harta bersama dengan isteri pertama telah diketahui jumlah dan jenisnya dan adil jika pencarian suami dengan isteri terdahulu hanya dimiliki oleh suami dan isteri terdahulu.

⁹ Data sekunder yaitu wawancara bapak Munasik tanggal 22 Juni 2014.

- c. Asas kemanfaatan: dalam hal penetapan tersebut banyak manfaatnya yaitu menetapkan bagian, masing-masing isteri apabila terjadi sengketa di kemudian hari karena sudah ada kejelasan dari pengadilan berupa penetapan harta bersama yang berkekuatan hukum.

B. Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami Khususnya Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg

Sebelum membahas terkait isu hukum yang kedua, kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari harta bersama dan poligami. Harta Bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun isteri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan isteri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur lain dalam Perjanjian Perkawinan). Sedangkan poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dan pengertian poligami menurut pandangan Islam adalah praktik yang diperbolehkan (mubah, tidak larang namun tidak dianjurkan). Islam memperbolehkan seorang pria beristeri hingga empat orang isteri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh isterinya.

Dari definisi diatas kita bisa lihat pada prinsipnya harta bersama itu merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami dan isteri sejak terhitung mereka melangsungkan perkawinan. Sedangkan poligami merupakan suami mengawini perempuan lebih dari seorang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami diatur dalam Peraturan Peralihan Pasal 65 ayat (1) huruf a, b dan c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan:

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini , maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.

- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, memberikan pengaturan yang berbeda dengan ketentuan tersebut di atas, pasal ini menyatakan:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Selanjutnya pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami secara mendetil diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama¹⁰ menurut buku ini pengaturan harta bersama sebagaimana yang dimuat pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan menimbulkan ketidakadilan, karena dalam keadaan atau kasus tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, dengan demikian ketentuan pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan di bawah ini :¹¹

Pertama, harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.

Kedua, ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.

Ketiga, bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang, karena kematian atau perceraian, cara penghitungannya adalah untuk isteri

¹⁰ Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2010 halaman 140.

¹¹ Isak Munawar, **Makalah**., Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, hal. 24.

pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan (sebelum menikah dengan isteri kedua pen-), ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua (sebelum menikah dengan isteri ketiga pen-) ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri ketiga, kedua dan isteri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan isteri pertama.

Keempat, harta yang diperoleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama (masing-masing pen-) dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami atau isteri dari hadiah, hibah, atau warisan.

Dari ketentuan teknis dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama diatas pada prinsipnya sudah mengatur secara kongkret ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dimana isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi. Artinya dalam hal harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan antara suami dan isteri pertama merupakan hak secara mutlak yang dimiliki dari pasangan suami isteri tersebut. Sedangkan isteri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai hak dari harta bersama tersebut.

Dan pada pedoman teknis tersebut sudah mengatur secara tegas seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri yang terdapat dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan pengaturan secara rinci harta bersama tersebut karena dalam pasal tersebut pada keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang pertama sehigga dirasa menimbulkan ketidakadilan, maka dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama mengatur secara konkret kedudukan dan pembagian harta bersama tersebut.

Maka suami perlu mengatur mendistribusikan penghasilannya terhadap isteri-isterinya secara arif, adil dan bijaksana, apabila tidak demikian akan merugikan isteri yang dinikahi terdahulu dan paling lama hidup bersamanya.¹² Akan tetapi yang menjadi

¹² Isak Munawar, **Makalah**,, Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, hal. 26.

permasalahan dalam hal pembagian harta bersama dalam perceraian dan kematian yang terpadat pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama dimana cara penghitungannya adalah untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan (sebelum menikah dengan isteri kedua pen-), ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua (sebelum menikah dengan isteri ketiga pen-) ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri ketiga, kedua dan isteri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan isteri pertama.

Dari pembagian diatas penulis menggambarkan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang nantinya ketika terjadi kematian dan perceraian dalam perkara Nomor: 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg dimana Pengadilan Agama Kota Malang menetapkan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet), Sebidang tanah yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang, Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mawar Kota Malang dan semua perabot rumah tangga yang berada dirumah pemohon dan termohon. Maka harta bersama tersebut pembagian nantinya dibagi menjadi setengah bagian untuk pemohon dan setengah bagian untuk termohon. Sedangkan calon isteri pemohon tidak berhak atau tidak mempunyai hak atas harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dalam perjalanan hidup rumah tangganya pemohon dan calon isteri pemohon nantinya akan hidup bersama dengan bermodal harta bersama yang sekarang sudah ditetapkan oleh hakim menjadi harta bersama pemohon dan termohon.

Sehingga nantinya dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian maka pembagian harta bersama dari para pihak yaitu Pemohon dan Termohon akan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dalam perkawinan yang pertama ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh semenjak pemohon dan calon isteri pemohon menikah. Sedangkan calon isteri pemohon mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang nantinya diperoleh semenjak mereka melangsungkan perkawinan. Pembagian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dimana harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

Dalam pembagian diatas menurut penulis pembagian tersebut tidak mencerminkan keadilan karena dilihat dari sisi waktu berumah tangga pemohon dan termohon selain penambahan atau pengurangan harta kekayaan pemohon setelah berpoligami calon isteri pemohon, tiada lain adalah merupakan keuntungan dari harta bersama antara pemohon dan termohon yang sekarang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Kota Malang menjadi harta bersama. Maka nantinya pada penyelesaian tersebut termohon dirugikan, karena secara perhitungan seharusnya termohon memperoleh keuntungan dari aset modal yang nantinya sebagai penopang hidup pemohon, termohon dan calon isteri pemohon. Sehingga dengan keadaan tersebut seharusnya setengah keuntungan yang nantinya diperoleh dari hasil berumah tangga antara pemohon, termohon dan calon isteri pemohon seharusnya setengah bagian dari keuntungan tersebut dikembalikan menjadi harta bersama antara pemohon dan termohon dan setengahnya dibagi menjadi masing-masing 1/3 bagian yaitu pemohon, termohon dan calon isteri termohon. Dengan pembagian seperti diatas dirasa cukup untuk keadilan untuk isteri yang pertama atau termohon karena pada prinsipnya perempuan tidak mau di madu atau di poligami.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon. Hal ini menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan.
2. Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg pembagiannya tergantung pada keadaan harta bersama tersebut, apabila harta bersama bergabung tidak dipisahkan antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dengan perincian sesuai pedoman yang dimuat buku II dan dengan memperhatikan aspek kearifan, dan keadilan. Apabila harta bersama telah dipisah sejak semula antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki dipisahkan dan berdiri sendiri.

B. Saran

1. Dalam hal menetapkan dan pembagian harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami hakim harus mengutamakan keadilan hukum dimana merupakan tujuan hukum yang paling baik bagi para pihak yang berperkara. Karena pada prinsipnya dalam hal perkara permohonan perkawinan poligami yang paling dirugikan yaitu pihak perempuan karena setiap perempuan pada dasarnya tidak mau untuk di madu atau di poligami.
2. Perlu adanya revisi atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait perkawinan poligami karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada belum mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi perempuan.

Daftar Pustaka

BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Perkawinan Islam**, Yogyakarta, 1977
- Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2007
- Asfinawati., Et. Al., **Bila anda harus cerai: Hak-hak Perempuan Seputar Perceraian**, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Cetakan Ke-1, Jakarta, Oktober, 2004
- Arifin, Bustanul., **Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya**, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Abdulrahman dan Riduan syahrani, **Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia**, Bandung, Alumni, 1978
- Budi Winarno, **Sistem Politik Indonesia Era Reformasi**, Medpress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2008
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, **Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1978
- H.M.,Anshary MK, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama**, Mandar Maju, 2007, Bandung, hal.6
- Hazairin, **Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**, Jakarta ,Tinta Mas,1975, hal. 83.
- Imam Sudiyat, **Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional**, Yogyakarta, Liberty, 1981
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Banyumedia Publishing, 2008
- K. Wantjik Saleh, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Jakarta., Ghalia Indonesia, 1990
- Lili Rasjidi, **Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Alumni, Bandung, 1983
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional**, Medan, Zahir Trading Co., 1975
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, **Pluralisme Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia**, Surabaya Airlangga University Press, Surabaya, 1988

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 1990

Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 1985

Wirjono Projodikoro, **Hukum Perkawinan Di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1984

Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, **Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Yusuf Wibisono, **Monogami atau Poligami Sepanjang Masa**, Jakarta, Bulan Bintang, 1980

Kamus Hukum dan Ensiklopedia Bidang Hukum

UNDANG-UNDANG

HIR (Het Herziene Indonesia Reglemen)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2010

PENETAPAN

Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.MLG.

MAKALAH DAN INTERNET

Isak Munawar, **Makalah**., Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami